

**PERAN HUMAS BKKBN PROVINSI RIAU DALAM
MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA (KKBPK)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

SYAPI'I
NIM. 11443101325

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : Syapi'i
Nim : 11443101325
Judul Skripsi : Peran Humas BKKBN Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

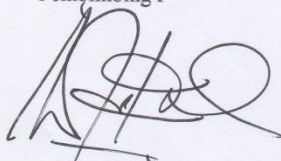
Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

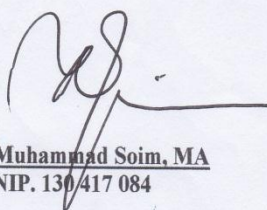
Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Intan Kemala, M.Si
NIP. 19810612 200801 2 017

Pembimbing II



Muhammad Soim, MA
NIP. 130417 084

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP. 196911181996032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004, Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Peran Humas BKKBN Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program KKBPK"** yang ditulis oleh:

Nama : Syapi'i
 NIM : 11443101325
 Jurusan : Ilmu Komunikasi (Public Relations)

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 16 Desember 2019

Dan disetujui sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2020

Dekan

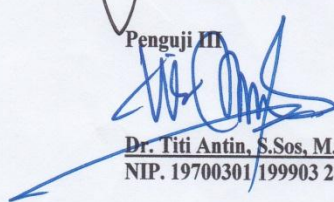

Dr. Nurdin MA
 NIP. 19660620 200604 1 015

Tim Penguji

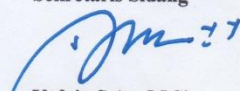
Ketua Sidang


Dr. Nurdin MA
 NIP. 19660620 200604 1 015

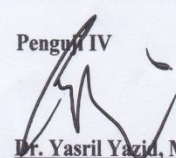
Penguji III


Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19700301 199903 2 002

Sekretaris Sidang


Yefni, S.Ag, M.Si
 NIP. 19700914 201411 2 001

Penguji IV


Dr. Yasril Yazid, M.S
 NIP. 19720429 200501 1 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

SURAT PENGESAHAN

Proposal dengan judul "Peran Humas BKKBN Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)" yang diajukan oleh saudara:

Nama : Syapi'i
Nim : 11443101325
Jurusan : Ilmu Komunikasi

Yang telah diseminarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 25 Maret 2019

Dengan ini dapat diterima untuk penulisan skripsi selanjutnya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 3 Juni 2019

Penghji

Edison, S.Sos, M.I.kom
NIP. 130 417 082

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembar Pernyataan Keaslian/Orisinalitas

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Syapi'i
NIM : 11443101325
Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan, 21 Juni 1996
Jurusan : Ilmu Komunikasi/Public Relation
Judul Skripsi : Peran Humas BKKBN Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian,

Pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, November 2019

Yang membuat pernyataan



SYAPI'I
11443101325

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, November 2019

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 4 (Eksemplar) Skripsi

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi
a.n Syapi'i

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

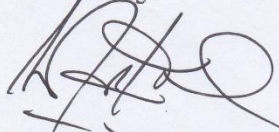
Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara Syapi'i NIM. 11443101325 dengan judul **"Peran Humas BKKBN Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) dalam bidang Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

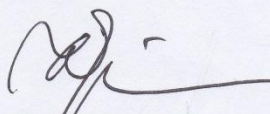
Pembimbing I



Intan Kemala, M.Si

NIP. 19810612 200801 2 017

Pembimbing II



Muhammad Soim, MA

NIP. 190 417 084

ABSTRAK

Nama : Syapi'i
Nim : 11443101325
Prodi : Ilmu Komunikasi
Judul : Peran Humas BKKBN Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan peran humas yang digunakan oleh BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program KKBPK lahir untuk mengendalikan jumlah penduduk demi mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, BKKBN Provinsi Riau menggunakan humas yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mensosialisasikan programnya. Melihat pentingnya program Keluarga Berencana untuk menghadapi bonus demografi mendatang, maka dari itu skripsi yang penulis buat berjudul “Peran Humas BKKBN Provinsi Riau dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)”. Terdapat rumusan dari masalah ini yakni Bagaimana peran humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program KKBPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Dozier dan Broom. Informan primer dalam penelitian ini ialah bidang humas BKKBN Provinsi Riau. Pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi pustaka. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode analisis studi deskriptif yakni, mendeskripsikan data yang didapat melalui realita dan fenomena yang sebenarnya. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran humas yang digunakan BKKBN Provinsi Riau hambatan dan tantangannya. Seiring dengan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian skripsi ini, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa peran humas dalam mensosialisasikan program KKBPK yang dilakukan humas BKKBN Provinsi Riau berdasarkan indikator-indikator dari teori yang digunakan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Akan tetapi adapun faktor penghambat dan tantangan dalam mensosialisasikan program tersebut ialah kualitas dan kuantitas Sumber Daya manusia yang masih kurang dan masalah dana.

Kata Kunci : Humas, KKBPK, BKKBN Provinsi Riau



- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Saes and Uiversit of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Name : Syapi'i
Student Reg. No : 11443101325
Department : Communication
Title : **The Role of the Public Relations of BKKBN Riau in Socializing the Population Development of Family Planning Program (KKBPK)**

This research is conducted to explain the role of public relations of the BKKBN Riau in socializing the Population Development of Family Planning Program (KKBPK). The KKBPK program was issued to control the population in order to realize balanced and prosperous population growth. To achieve this goal, BKKBN Riau Province uses public relations which is one of the keys to the success of socializing the program. Seeing the importance of the Family Planning program to deal with the upcoming demographic bonus, therefore the thesis is entitled "The Role of BKKBN Riau Province Public Relations in Socializing the Population Development of Family Planning Program (KKBPK)". There is a formulation of this problem namely How is the role of BKKBN Riau Province public relations in socializing the KKBPK program. This study uses descriptive qualitative research methods using Dozier and Broom theory. The primary information in this study is the public relations of BKKBN Riau Province. Data are obtained based on the results of interviews, observations and literature studies. Meanwhile, to analyze the data, it uses descriptive study analysis method that is, describing the data obtained through reality and actual phenomena. This thesis aims to know the role of public relations of the BKKBN Riau including its obstacles and challenges. This thesis finds that the role of public relations in socializing the KKBPK program, based on indicators of the theory, has been vital. However, the inhibiting factors and challenges in socializing the program are the quality and quantity of human resources including funding problems.

Keywords: Public Relations, KKBPK, BKKBN Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lainnya. Dan hanya kepada Tuhanmu, hendaklah engkau berharap. (Q.S. Al Insyirah : 6-8)

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas segala berkat rahmat, hidayah, inayah-Nya, serta kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah kepada zaman yang penuh cahaya dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Skripsi dengan judul : **“Peran Humas BKKBN Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ”** ini ditulis oleh penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan proposal, penelitian dan penyusunan skripsi ini. Untuk itu pula penulis menyampaikan penghargaan ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang penulis cintai, yaitu Ayahanda H. Hamran (Alm) dan ibunda Nafsiah serta ke 5 saudara kandung saya yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan, dan doa kepada penulis. Seterusnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Wakil Rektor I, II, III UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si dan Bapak Dr. Azni, Mag selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dra. Atjih Sukaeshi, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Bapak Yantos, S.I.P selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Masrun DR. H. MA selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Intan Kemala, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, kesempatan dan memberikan pengarahan-pengarahan dan nasehat demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Soim, MA selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, kesempatan dan memberikan pengarahan-pengarahan dan nasehat demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan mempermudah penulis mendapatkan buku hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta seluruh Pegawai dan Tenaga Honorer Perwakilan BKKBN Provinsi Riau beserta jajarannya Khusus nya Ibu Merry, Ibu Hidayati, Pak Dasril, Bg Zalis, Bg Irwanto, Bg Nanda, Bg Hendri, Bg Irul, Bg Enggar, Kak Erma, Ratih, Kak Dian, Kak Nur Dan Azizah yang telah Menyemangati serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

11. Teman-teman Public Relation C tahun 2015 yaitu Ade Lilla, Ardian Toni, Aulia Andriyanto, Dio Pratama P, Eka Wahyuni, Gebby Destia S, Gista Aprilia, Hendra Cahyadi, Hilma Arifah Lubis, Ibnu Ali, Intan Cornela, Irfan Tasbih, Irvan Desa Ritonga, Khairani Syam, Khairul Anwar, M.Ryza Bayudhi, Mardalena Eka S, Mayda Putri, Muhammad Yamin, Nora Fariza, Novia Kolopaking, Nopiyarni, Nurul Fitriani, Ozi Tryvela, Pinta Ummisha, Renny Umami, Rika Opriani, Rima Triana, Ryan Andre, Sergio Efendi, Sherly Wulandari, Syaikul Syahid, Wanda Winalda, Wardatul Jannah, Widya Astuti, Wirda Nofira, Yani Hariyani Dan Zulmahdi.
12. Sahabat KKN Uin Suska Riau 2017 Posko Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Provinsi Riau.
13. Sahabat Gamers (Coki, Acok, Bos, Bontoy) dan saudara seperjuangan yang penulis sayangi.
14. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberi manfaat kepada semua kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis, maupun masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamuma'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Pekanbaru, Oktober 2019
Penulis

UIN SUSKA RIAU

SYAPI'I
NIM. 11443101698

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Teori	8
B. Kajian Terdahulu.....	23
C. Kerangka Pikir	27
D. Konsep Operasional	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Validitas Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.....	34
B. Letak Geografis Perwakilan BKKBN Provinsi Riau	44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi dan Misi Perwakilan BKKBN Provinsi Riau	45
D. Uraian Tugas Bidang Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.....	45
E. Struktur Organisasi Unit Kerja BKKBN Provinsi Riau.....	51

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan.....	82

BAB VI PENUTUP

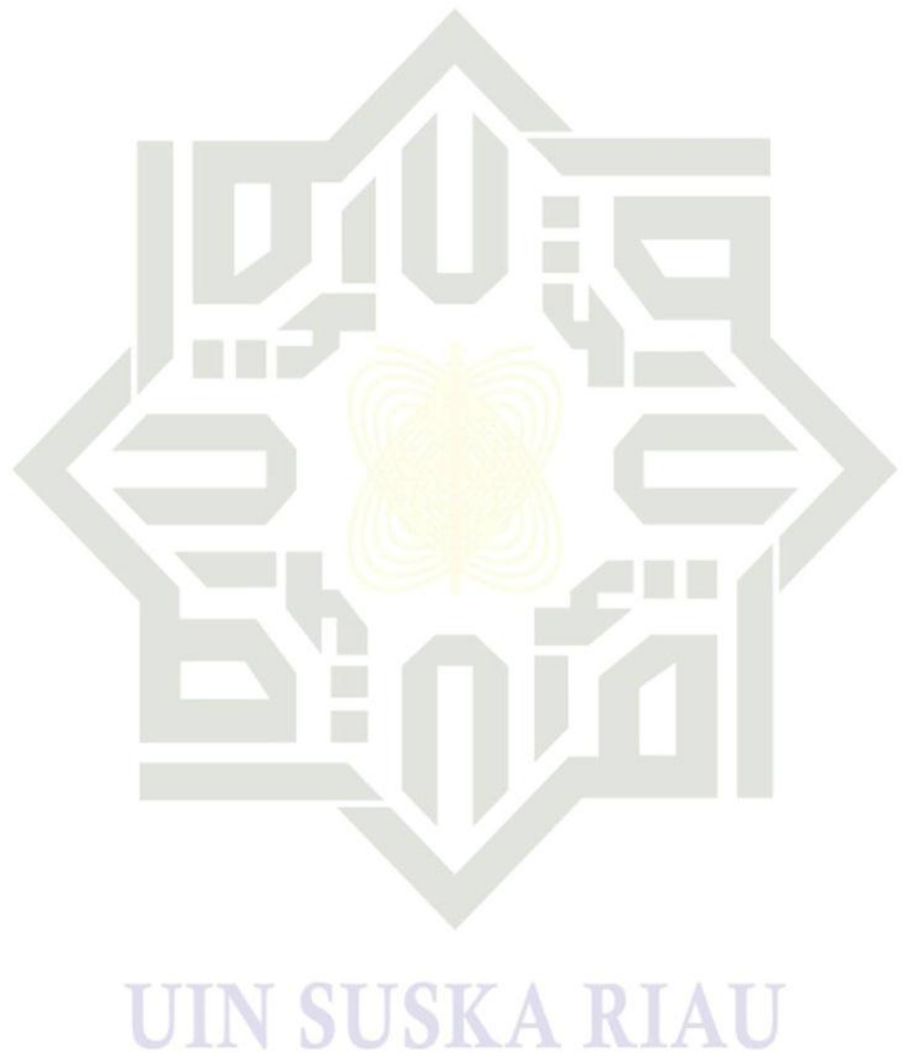
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Narasumber Penelitian	55
-----------	-----------------------------	----



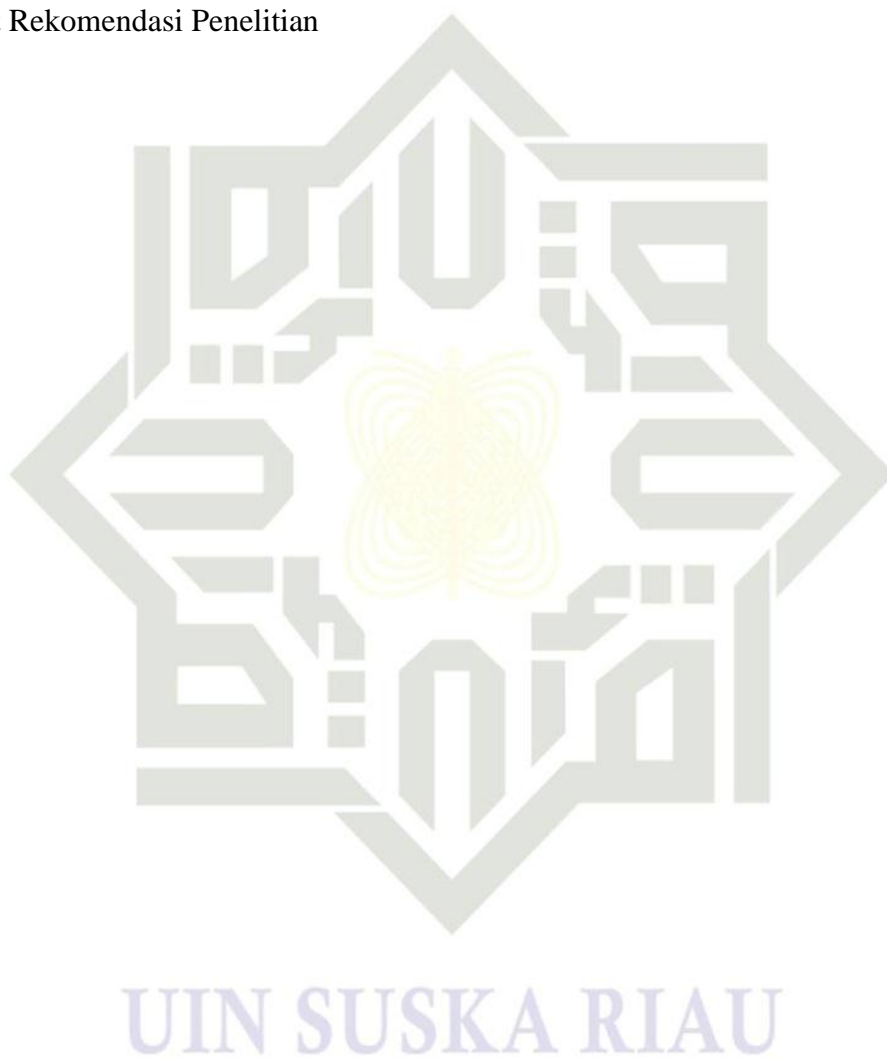
- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	27
Gambar 4.1	Letak Geografis Perwakilan BKKBN Provinsi Riau	44
Gambar 5.1	Arus Komunikasi	60
Gambar 5.2	Halaman Depan Website BKKBN Provinsi Riau	64
Gambar 5.3	Halaman Depan Akun Instagram BKKBN Provinsi Riau	65
Gambar 5.4	Talkshow di Riau Televisi dalam Mensosialisasikan Program	67
Gambar 5.5	Sosialisasi Program KKBPK Secara Langsung	68
Gambar 5.6	Rapat Pembukaan Review Program KKBPK Provinsi Riau	73
Gambar 5.7	Ajang Pemilihan Duta Mahasiswa Genre	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Wawancara
- Lampiran 2 : Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Orisinilitas
- Lampiran 4 : Surat Mengadakan Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Penelitian
- Hak Cipta Teknik PIN Suska Riau**
- Hak Cipta Teknik PIN Suska Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Negara Indonesia ada sebuah lembaga pemerintahan yang programnya fokus dalam bidang kependudukan dan keluarga. BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Selain itu dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, arah kebijakan BKKBN salah satunya adalah mempromosikan kepada masyarakat umum tentang Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). Program KKBPK lahir untuk mengendalikan jumlah penduduk demi mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas.

Program KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) dicanangkan pemerintah secara nasional sejak tahun 1970, dalam perkembangannya terus mengalami pasang surut. Sayangnya, perhatian dan dukungan berbagai pihak terhadap program KKB jauh menurun sejak era reformasi. Walaupun belakangan terlihat mulai menggeliat. Ternyata lengahnya perhatian selama kurang lebih satu dasawarsa harus dibayar mahal. Bukan hanya gaung KKB yang nyaris tak terdengar setelah sebelumnya gegap gempita, tetapi juga peningkatan LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) yang cukup mengejutkan setelah beberapa dasawarsa terus mengalami penurunan cukup signifikan. Bila LPP pada periode 1971 - 1980 besarnya masih 2,31% pertahun dan pada periode 1980 - 1990 dapat diturunkan menjadi 1,98% dan dapat ditekan lagi menjadi 1,45% pada periode 1990 - 2000, maka pada periode 2000 - 2010 kembali naik menjadi 1,49%. Yang menyedihkan, kita yang banyak berharap terhadap kenaikan peserta KB aktif untuk menekan TFR (*Total Fertility Rate*) yaitu jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita, juga tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Terbukti, selama satu dasa warsa terakhir TFR tetap dalam

kondisi stagnan. Ini dapat dilihat dari hasil SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2002 - 2003, 2007 dan 2012.

Meskipun program KKB telah diatur oleh UU No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan ada juga PP No 52 Tahun 2009 yang mengikutinya telah disahkan pemerintah, perhatian pemerintah kabupaten/kota terhadap program KKB belum sesuai harapan. Hal ini dikarenakan komitmen sebagian besar kepala daerah yang kurang mendukung pelaksanaan program KKB karena dianggap tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap peningkatan APBD. Hal ini dapat dipahami karena program KKB adalah program sosial dasar yang baru dapat dirasakan manfaatnya 10 atau 20 tahun mendatang, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota yang mengharuskan mereka menyusun skala prioritas dan untuk sementara mengesampingkan program KKB, keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, dan keterbatasan sarana prasarana pendukung kelancaran program, walaupun keterbatasan ini belakangan dapat diminimalisir dengan adanya DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang KB untuk penyediaan sarana prasarana program KKB sejak tahun 2008 lalu.

Selain itu BKKBN memiliki hubungan yang erat dengan humas yang dalam aktivitas sehari-hari adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik (*two way communications*) antara perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu. Kegiatan humas tersebut sangat erat hubungannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat.¹ Humas berkewajiban untuk memberikan informasi yang aktual, terutama informasi yang sedang berkembang di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar publik mampu menangkap informasi yang diberikan.

Dalam proses mensosialisasikan program keluarga berencana kepada masyarakat yang dilakukan oleh humas BKKBN, bukanlah semata-mata hanya sebatas agar masyarakat tahu dan mengerti, akan tetapi lebih dari itu, humas

¹ Rosady Ruslan, S.H., *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1

BKKBN harus lebih gencar mengadakan pendekatan-pendekatan persuasif sebagai langkah strategis untuk membangkitkan motivasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam program keluarga berencana.

Dari hal ini terlihat bahwa humas memiliki peranan penting untuk melaksanakan program, mengelola, dan mengembangkannya. Dalam Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, agar berjalan dengan optimal sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Riau bekerja ekstra dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga ini, termasuk dalam mempromosikan kepada masyarakat umum.

Adapun peranan humas dapat terbagi dalam empat kategori menurut Teori Dozier & Broom adalah sebagai berikut:²

1. Penasihat Ahli (*Expert Prescriber*)

Seorang praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya.

2. Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*)

Dalam hal ini, praktisi humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya..

3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*)

Peranan praktisi humas dalam proses pemecahan masalah persoalan humas merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pemimpin organisasi baik sebagai penasihat hingga mengambil tindakan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi.

4. Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*)

Berbeda dengan tiga peran praktisi humas profesional sebelumnya yang terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Peran teknisi

²Rosady Ruslan, *Op.Cit*;. 20-21

komunikasi ini menjadikan praktisi humas sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan *methode of communication in organization*.

Untuk itu, Humas BKKBN Rovinsi Riau harus berperan aktif dalam mensosialisasikan segala bentuk program Keluarga Berencana agar masyarakat mendapatkan pengertian tentang program Keluarga Berencana, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap program KKBPK yang dilakukan oleh BKKBN. Maka dari itu jelaslah bahwa keberhasilan dari program KB tidak lepas dari partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai objek dalam program KB.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi penelitian yang diberi judul **“PERAN HUMAS BKKBN PROVINSI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)”**.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memprediksi dan memahami kajian penelitian ini, perlu di tegaskan beberapa istilah-istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar tidak keluar jalur yang akan di kaji penulis, yaitu:

1. Peran Humas.

Peran hubungan masyarakat sangat erat kaitannya dengan fungsi humas, yang menurut F. Rachmadi adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan lembaga atau organisasi.³

2. BKKBN. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), disingkat BKKBN, adalah

³ Dr. H. Zainal Mukarom, M.Si & Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.Si., *Manajemen Public Relations*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 56.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.⁴

3. Sosialisasi Program BKKBN.

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan seseorang individu untuk berbuat atau bertindak laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam sebuah instansi pemerintahan maupun swasta. Jadi sosialisasi dalam penelitian ini adalah melihat seperti apa Peran Humas BKKBN Provinsi Riau dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Tujuannya untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kebutuhan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana peran humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga.

⁴Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (Onlien) https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

- 1) Untuk menambah pengalaman penulis dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dari perkuliahan bagi penulis.
- 2) Sebagai aplikasi dari teori-teori yang penulis peroleh diperkuliahan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.
- 3) Bentuk sumbangsih pemikiran penulis, yang dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi konsentrasi *Public Relation*.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai referensi, bahan pertimbangan, dan masukan bagi BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga.
- 2) Agar bisa menjadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten lainnya khususnya dalam meningkatkan kepuasan pelanggan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui sistematika Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai tahapan awal yang menjadi landasan dari keseluruhan isi skripsi, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori dan Kerangka Pikir

Bab ini membahas tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data.

2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambaran Umum BKKBN Provinsi Riau

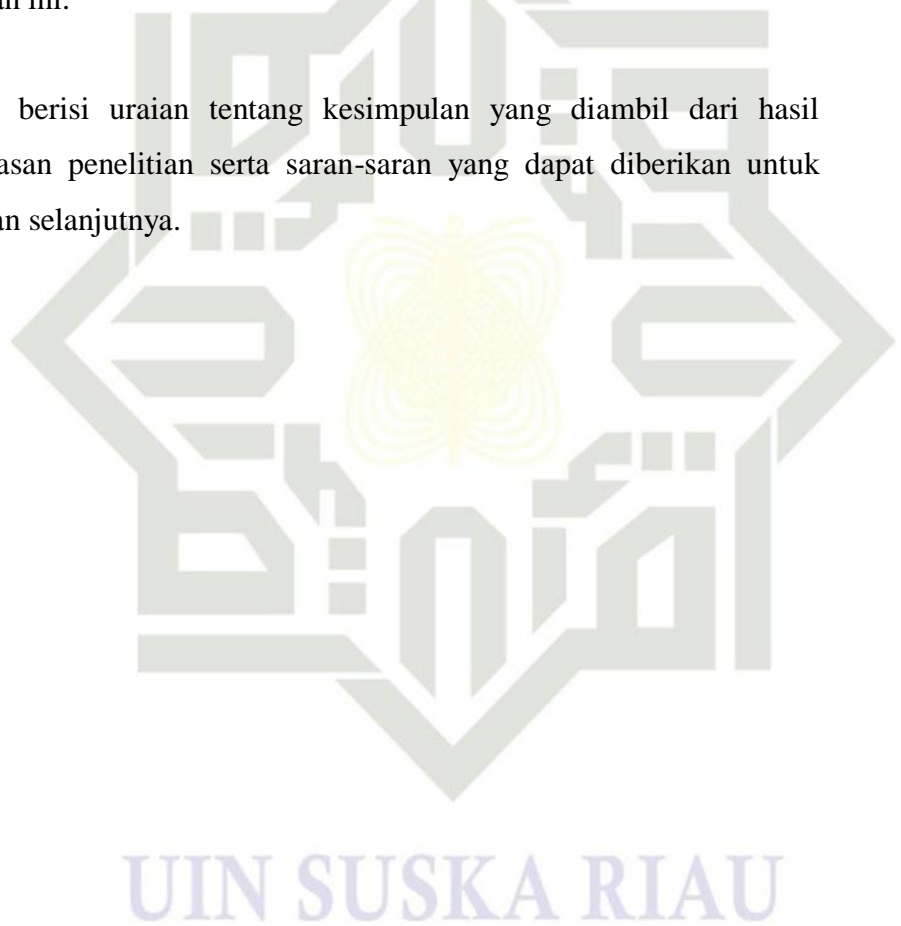
Bab ini membahas sejarah BKKBN Provinsi Riau, khususnya deskripsi objek penelitian bagian Humas BKKBN, visi misi, struktur organisasi dan lain-lain dari BKKBN Provinsi Riau.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang Peran Humas BKKBN dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam penelitian ini.

Penutup

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan persepsi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena pada umumnya. Penggunaan teori yang penting kiranya dalam menelaah suatu masalah atau fenomena yang terjadi sehingga fenomena tersebut dapat diterangkan secara eksplisit dan sistematis.

1. Konsep Peran Humas

a. Definisi Peran

Morisan, M.A. dalam bukunya *Manajemen Public Relations* menyatakan bahwa peran dan fungsi hubungan masyarakat dapat diwujudkan dalam program kegiatan humas yang telah dirancang sebelumnya dengan strategi yang tepat agar dapat berjalan dengan baik.⁵

Secara sosiologis, peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut sebagai subjektif. Hal ini senada dengan pendapat Soekanto yang mengatakan bahwa peran adalah aspek dinamisasi dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.⁶

Peran dibagi menjadi tiga, yaitu peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok pada umumnya kepada kelompoknya, partisipasi anggota ini akan member sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, mana anggota kelompok menahan diri agar member kesempatan kepada

⁵ Morisan, M.A. *Manajemen Public Relations*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 125.

⁶ Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si., *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 43.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik. Dengan cara bersikap pasif, seseorang telah member sumbangan kepada terjadinya kemajuan dalam kelompok atau member sumbangan kepada kelompok agar tidak terjadi pertentangan dalam kelompok karena adanya peran-peran yang kontradiktif.⁷

Peran juga mencakup tiga hal: (a) peran meliputi norma-norma yang menghubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, dengan demikian peran berfungsi membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat; (b) peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; (c) peran juga menyangkut perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian peran terkandung makna, penyesuaian atau dinamisasi dari fungsi-fungsi yang melekat pada seseorang atau badan lembaga, yang di dalamnya terdapat wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Peran mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalankan seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga di masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat empat macam peranan penting yang ada didalam masyarakat, yaitu:

1. Sebuah peranan harus dilaksanakan apabila terdapat struktur masyarakat yang akan dipertahankan keberadaannya.
2. Peranan hendaknya hanya diletakkan kepada pihak yang dianggap mampu untuk melaksanakannya. Sebaiknya berlatih terlebih dahulu untuk menumbuhkan kemampuan tersebut.
3. Terkadang didalam masyarakat ditemui pemegang peran yang tidak mampu melaksanakan sebuah peran karena pelaksanaan peran tersebut terlalu banyak mengorbankan kepentingan - kepentingan pribadi.

Prof. Dr. HM. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 274

Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Dra Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 244

4. Apabila semua yang memegang peran mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat dapat dengan leluasa memberikan peluang kepadanya untuk dapat melaksanakan peran dengan baik, karena mereka memberi batasan.⁹

b. Konsep Humas

Banyak ahli yang berpendapat bahwa penerjemahan istilah *public relations* menjadi hubungan masyarakat adalah kurang tepat. Pandangan tersebut didasarkan pada alasan, sebagai berikut. *Public* atau biasa ditulis publik atau khalayak, tidak sama dengan masyarakat atau *society*. Pengertian masyarakat (*society*) menurut JBAF Mayor Polak dalam Sosiologi, adalah wadah seluruh antar hubungan sosial dengan seluruh jaringannya dalam arti umum, tanpa menentukan suatu batas tertentu.¹⁰

Sedangkan pengertian *public* dapat ditinjau dari dua segi, menurut J. Handly Wright and Byron H. Christian dari segi geografis dan psikologis, sesecara geografis *public* adalah sejumlah orang yang berkumpul bersama-sama di suatu tempat tertentu. Dari pengertian ini maka dikenal pembagian-pembagian publik (nasional, regional, lokal). Secara psikologis publik adalah orang-orang atau sekelompok orang yang menaruh perhatian pada suatu kepentingan yang sama tanpa ada sangkut pautnya dengan tempat di mana mereka berada. dapat berupa kelompok kecil ataupun kelompok besar. Individu-individu disini biasanya mempunyai solidaritas terhadap kelompoknya, walaupun tidak terikat oleh struktur yang nyata, tidak berada dalam suatu tempat, ruangan dan tidak mempunyai hubungan langsung.

Demikian pula dengan penerjemahan *relations* ke dalam hubungan, juga kurang tepat. Sebab pengertian *relations* di sini menggunakan “s” yang menunjukkan arti jamak. Istilah *relations* bagi *public relations* merupakan prinsip, karena dengan *relations* mengandung arti adanya hubungan timbal balik (*two way communications*). Kemudia *relations* yang dimaksud *public relations* dalam

⁹ *Ibid*; 213

¹⁰ Drs. Bambang Siswanto, MA., *Humas Hubungan Masyarakat Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 3

praktek, selalu dalam pengertian yang positif, artinya bahwa *relations* diadakan dalam rangka memperoleh *a sound and productive relations*, baik dengan *public* tertentu maupun dengan masyarakat pada umumnya.

Humas adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dilakukan secara berkesinambungan, yang oleh organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga umum atau pribadi yang dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada hubungan badan diduga akan ada kaitannya dengan organisasi tersebut, dengan cara menilai opini publik mereka, dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan, guna mencapai kerja sama yang lebih produktif dan memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan kegiatan penerangan yang terencana dan tersebar luas.¹¹

c. Peran Humas

Peran seorang humas adalah sebagai sarana untuk menjalin sebuah hubungan baik dan saling pengertian antara suatu lembaga atau organisasi terhadap publik atau khalayaknya. Namun tidak hanya itu saja, melainkan juga berbagai program-program dan upaya yang telah dikonsep oleh seorang humas melalui setiap cara berpikirnya berfungsi untuk mencapai cita-cita suatu lembaga atau perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan pekerjaan seorang humas merupakan ujung tombak perusahaan itu sendiri. Kelangsungan hidup suatu perusahaan terletak pada humas. Berbagai upaya seperti publikasi, sosialisasi, periklanan, menjalin hubungan baik dengan pers dan khalayak dilakukan untuk menanamkan *goodwill*, kepercayaan, dan citra yang baik di mata publik.

Peran hubungan masyarakat sangat erat kaitannya dengan fungsi humas, yang menurut F. Rachmadi adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan lembaga atau organisasi.¹²

¹¹ Ruslan Rosady, 2010. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, Jakarta: Grafindo: hlm. 23

¹² Dr. H. Zainal Mukarom, M.Si & Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.Si., *Manajemen Public Relations*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 56.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Peran humas dalam sebuah organisasi berkaitan dengan tujuan utama dan fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Fungsi dasar manajemen tersebut merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian suatu tujuan pokok dari organisasi atau lembaga dan biasanya berkaitan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber-sumber (sumber daya) yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga tersebut.

Sebagai seorang Humas dituntut kemampuannya untuk mengkoordinasikan seluruh unsur sumber daya yang ada. Hal ini merupakan konsekuensi dari kemampuan sebagai fungsi manajemen teknis (*technical management*) dan kemampuan berperan sebagai manajer profesional (*managerial skill*).¹³

Sedangkan Onong Uchjana mengungkapkan peranan *public relations*, yaitu mencakup bidang yang luas menyangkut hubungan dengan berbagai pihak dan tidak hanya sekedar berbentuk *relations* dalam arti sempit, karena *personal relations* mempunyai peranan yang cukup besar dalam melakukan kampanye *public relations*. Bagaimana meningkatkan kesadaran, pengertian, dan pemahaman tentang aktivitas perusahaan atau lembaga termasuk membentuk sikap baik (*favorable*), itikad baik (*good will*), toleransi (*tolerance*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling mempercayai (*mutual confidence*), saling menghargai (*mutual appreciation*), yang pada akhirnya akan menciptakan citra yang baik (*good image*).¹⁴

Adapun peranan humas dapat terbagi dalam empat kategori menurut Teori Dozier & Broom adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Penasihat Ahli (*Expert Prescriber*)

Seorang praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya.

¹³ Rosady Ruslan, S.H, M.M., *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.13 Cet. 12

¹⁴ Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 12.

¹⁵ Rosady Ruslan, *Op.Cit*; hlm. 20-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*)

Dalam hal ini, praktisi humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Disisi lain, dia juga dituntut untuk mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta rasa saling percaya, pengertian, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari kedua pihak.

3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*)

Peranan praktisi humas dalam proses pemecahan masalah persoalan humas merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pemimpin organisasi baik sebagai penasihat hingga mengambil tindakan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi. Biasanya dalam menghadapi krisis yang terjadi, maka dibentuk suatu tim posko yang dikoordinir praktisi ahli humas dengan melibatkan berbagai departemen dan keahlian dalam satu tim khusus untuk membantu organisasi, perusahaan dan produk yang tengah menghadapi atau mengatasi persoalan krisis tertentu.

4. Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*)

Berbeda dengan tiga peran praktisi humas profesional sebelumnya yang terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Peran teknisi komunikasi ini menjadikan praktisi humas sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan *methode of communication in organization*. Sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-masing bagian atau tingkatan, yaitu secara teknis komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari bawahan ke tingkat atasan.

d. Ruang Lingkup Humas

Adapun ruang lingkup tugas humas dalam sebuah organisasi/lembaga antara lain meliputi aktivitas sebagai berikut:¹⁶

a. Membina hubungan ke dalam (*public internal*)

Yang dimaksud dengan *public internal* adalah publik yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang humas harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif didalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi.

b. Membina hubungan keluar (*public eksternal*)

Yang dimaksud *public eksternal* adalah publik umum (masyarakat), mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya.

Sedangkan ruang lingkup pekerjaan humas dapat dibagi menjadi enam bidang pekerjaan, yaitu:

a. Publisitas

Publisitas adalah informasi yang berasal dari sumber luar yang digunakan media massa karena informasi itu memiliki nilai berita. Publisitas merupakan metode yang dapat dikontrol humas dalam hal penempatan pesan media massa karena sumber tidak membayar media untuk berita bersangkutan.¹⁷

b. Pemasaran

Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Sementara itu menurut McCarthy, pemasaran menyangkut perencanaan secara efisien penggunaan sumber-sumber dan pendistribusian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga tujuan kedua pihak produsen dan konsumen tercapai.¹⁸

¹⁶ Rosady Ruslan, *Op.Cit*; hlm 23.

¹⁷ Zainal, *Op.cit.*, hlm. 57

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Manajemen isu

Manajemen isu (*issues management*), menurut Morisan merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik agar tidak berkembang secara negatif sehingga merugikan perusahaan atau agar isu tidak berkembang menjadi konflik yang tidak diinginkan.¹⁹

d. Lobi

Menurut Cutlip, lobi adalah bidang khusus humas yang membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah utamanya, untuk tujuan memengaruhi peraturan dan perundang-undangan.²⁰

e. Hubungan Investor

Hubungan investor adalah tanggung jawab manajemen strategis yang mengintegrasikan keuangan, komunikasi, pemasaran, dan kepatuhan hukum sekuritas yang paling efektif memungkinkan komunikasi dua arah antara perusahaan, masyarakat keuangan, dan konstituen lain, yang akhirnya memberikan kontribusi untuk perusahaan sekuritas mencapai penilaian adil.²¹

e. Ciri dan Fungsi Humas

Ciri adalah tanda yang khas untuk mengenal atau mengetahui. Berfungsi atau tidaknya humas dapat diketahui dari ada atau tidaknya kegiatan yang menunjukkan ciri-cirinya. Ciri-ciri humas antara lain:

- Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik.
- Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen sebuah organisasi.
- Publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik eksternal dan publik internal.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 64

²⁰ *Ibid.*, hlm. 65

²¹ *Ibid.*, hlm. 66

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Operasionalisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologi, baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik.²²

Adapun fungsi dari humas menurut Cutlip & Centre adalah sebagai berikut :

- a. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi).
- b. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.
- c. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang diwakilinya, atau sebaliknya.
- d. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan sasaran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama.
- e. Menciptakan komunikasi dua arah timbale balik, dan mengatur arus informasi, publikaasi serta pesaan dari badan/organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.²³

f. Humas Pemerintah

1) Tugas Humas Pemerintah

Tujuan humas di dunia pemerintahan adalah membuat program pemerintahan yang dapat membentuk, meningkatkan dan memelihara citra positif dan reputasi baik agar dapat memperoleh opini publik yang menguntungkan, serta dukungan dan simpati rakyat atau publik. Citra sengaja diciptakan oleh humas dalam dunia pemerintahan, dalam bentuk *events* (kegiatan-kegiatan), kampanye-kampanye, dan programs (program-program jangka panjang).²⁴

Menurut Dimock dan Koenig, pada umumnya tugas dan kewajiban pihak humas lembaga pemerintahan adalah sebagai berikut:

²² Onong Uchjana Effendy, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*, (Cetakan ke-6 PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 24.

²³ Rosady Ruslan, *Op.Cit*; hlm. 19.

²⁴ Soleh Soemirt & Elvinaro Ardianto, *Dasar-Dasar Public Relations*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a) Berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat (*public services*), kebijaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut.
- b) Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan, serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, hukum, politik, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.
- c) Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparat pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing secara konsisten serta professional²⁵

Secara garis besar, humas instansi pemerintah memiliki peran ganda. Fungsi keluar adalah berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi kedalam adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan publik/masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan bagi instansinya demi tercapainya tujuan bersama.²⁶

Peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

- a) Secara taktis dalam jangka pendek, Humas instansi pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan dan informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarnya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini publik sebagai upaya “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan maksud dari instansi/lembaga yang bersangkutan.
- b) Secara Strategis (jangka panjang) Humas instansi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*),

²⁵ Rosady Ruslan, S.H., M.M., *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Ed. Revisi, cet ke-6, 2011), hlm. 108.

²⁶ *Ibid*, hlm, 109-110

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memberikan sumbang saran, gagasan dan ide yang cemerlang serta kreatif untuk menyukseskan program kerja lembaga bersangkutan, hingga mampu menunjang keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong melalui kerja sama dan mendapat dukungan masyarakat.²⁷

2 Fungsi Pokok Humas Pemerintah

Rosady Ruslan menyatakan bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu:

- a) Kemampuan untuk membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan dari pihak pimpinan instansi atau lembaga dengan publik internal dan eksternal.
- b) Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi atau narasumber berita, baik berasal dari instansi atau lembaga maupun berasal dari pihak publiknya.
- c) Melakukan pendokumentasian dari setiap kegiatan publikasi dan peristiwa penting di lingkungan instansi atau lembaga.
- d) Mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan instansi atau lembaga atau opini publik yang berkembang sebagai upaya penelitian dan keperluan untuk analisis serta pengembangan rencana dan program kerja yang akan datang.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan perannya, Humas pemerintah harus mempunyai strategi terutama dalam memberikan informasi dan penjelasan kepada khalayak publik mengenai kebijakan dan langkah-langkah/tindakan yang diambil oleh pemerintah, serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara lembaga/instansi dengan publiknya dan memberikan pengertian kepada publiknya

²⁷ Rosady, *Op.Cit*; hlm. 110-111.

²⁸ *Ibid*; hlm. 110

(masyarakat) tentang apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah dimana humas itu berada dan berfungsi.

Sosialisasi

Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah peyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan seseorang bertindak dan bersikap sebagai anggota masyarakat yang efektif, yang menyebabkan ia efektif, yang menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.²⁹

Sedangkan menurut Robbins, sosialisasi merupakan salah satu fungsi dari komunikasi disamping sebagai produksi dan penegetahuan dalam hal ini komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota masyarakat agar tetap sesuai dengan apa yang menjadi perilaku kelompoknya. Jadi, dalam hal ini sosialisasi dilakukan dengan cara mengkomunikasikan kepada publiknya.³⁰

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan sosialisasi adalah salah satu fungsi komunikasi yang sesuai untuk mengendalikan perilaku anggota masyarakat di mana ia tinggal. Jadi sosialisasi dilakukan dengan mengkomunikasikan informasi kepada anggotanya.

Sosialisasi dalam arti yang luas merupakan suatu usaha masyarakat yang menghantar warganya masuk ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain masyarakat melakukan suatu rangkaian kegiatan tertentu untuk menyerahtherimakan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Proses sosialisasi bertujuan untuk:

- Member keterampilan yang dibutuhkan individu untuk hidupnya di masyarakat.
- Mengajarkan individu untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis dan berbicara.
- Melatih pengendalian fungsi-fungsi organic melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.

²⁹ Effendi, *Op.Cit*, hlm 27

³⁰ *Ibid*; hlm. 35.

- d) Membiasakan individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada dalam masyarakat.³¹

Dari semua definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi adalah usaha yang dilakukan seseorang, masyarakat atau lembaga untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan melalui teknik komunikasi dan menyediakan sumber pengetahuan kepada publik agar bertindak sesuai dengan masyarakat dimana ia tinggal dan dapat berfungsi dalam masyarakat tersebut.

Menurut Narwoko dan Bagong, proses sosialisasi yang relevan bagi pembentukan kepribadian dapat dibedakan atas:

- Proses sosialisasi yang dikerjakan (tanpa sengaja) lewat proses interaksi sosial.
- Proses sosialisasi yang dikerjakan (secara sengaja) lewat proses pendidikan dan pengajaran.³²

Berdasarkan pelaksanaan proses sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya proses ini bukanlah suatu aktivitas yang bersifat sepihak. Bagaimanapun juga proses sosialisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara aktif oleh dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasikan atau disebut dengan aktivitas melaksanakan sosialisasi dan pihak yang kedua adalah aktivitas pihak yang disosialisasikan.

b. Tipe Sosialisasi

Tipe sosialisasi setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi. Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Formal Sosialisasi, tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan disekolah dan pendidikan militer.

³¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 157

³² Narwoko & Bagong, *Sosiologi Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Informal Sosialisasi, tipe ini terdapat dimasyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat.³³

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Sosialisasi

1. Faktor Instrinsik

Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang melakukan proses sosialisasi tersebut. Wujud nyata dari faktor intrinsik antara lain dapat berupa bawaan - bawaan ataupun warisan biologis termasuk kemampuan - kemampuan yang ada pada diri seseorang. Misalnya bakat, IQ, motivasi, emosi, hobi, karakter, dan lain - lain. Faktor - faktor ini akan menjadi bekal seorang individu dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam proses sosialisasi.

2. Faktor ekstrinsik

Faktor ekstrinsik pada dasarnya merupakan faktor - faktor yang berasal dari luar diri individu yang melakukan proses sosialisasi tersebut. Faktor ekstrinsik ini dapat berupa norma- norma, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem mata pencaharian yang ada di dalam masyarakat. Untuk melakukan proses sosialisasi seorang individu akan dibatasi dengan nilai - nilai dan norma - norma yang ada di dalam masyarakat.³⁴

3. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Pengertian Keluarga Berencana (KB) menurut UU no. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki

³³ Marlanny Rumimpunu, Jurnal ilmiah : “Strategi Humas Dalam Mensosialisasikan Program Listrik Pintar PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo di Ranotana”, 2014

³⁴ Tim new master. Sosiologi, media karya putra: bandung, hlm 5-6.

jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertanggung kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kebutuhan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Kesimpulan dari tujuan program KB adalah memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa, mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa, dan memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

Tujuan KB meliputi:

1. Keluarga dengan anak ideal.
2. Keluarga sehat.
3. Keluarga berpendidikan.
4. Keluarga sejahtera.
5. Keluarga berketahanan.
6. Keluargayang terpenuhi hak-hak reproduksinya.
7. Penduduk tumbuh seimbang (PTS).

Ruang Lingkup Program Keluarga Berencana antara lain :

1. Kesehatan reproduksi remaja.
2. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
3. Penguatan lembaga keluarga kecil berkualitas.
4. Keserasian kebijakan kependudukan.
5. Pengelolaan SDM aparatur.
6. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan.
7. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

Program Keluarga berencana memberikan dampak, yaitu :

1. Penurunan angka kematian ibu dan anak.

2. Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.
3. Peningkatan kesejahteraan keluarga.
4. Peningkatan derajat keluarga.
5. Peningkatan mutu dan layanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
6. Peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM.³⁵

B. Kajian Terdahulu

Penelitian ini akan dicantumkan beberapa skripsi yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini mengenai “Peran Humas” secara umum sebagai berikut:

- a. Harry Gunawan (2013) Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul penelitian *Strategi Humas BKKBN dalam Mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau*. Hasil dari penelitian ini yaitu secara umum dapat disimpulkan bahwa Humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana tidak bekerja dengan sendirinya, humas memerlukan peran komunikator baik dari pihak internal maupun eksternal agar mempermudah dalam proses mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau, selain itu humas juga bekerja sama dengan pihak media massa, baik media cetak maupun media elektronik agar sosialisasi program keluarga berencana tersebar secara merata keseluruhan masyarakat Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah deskriptif kualitatif terhadap data yang penulis dapatkan yaitu pengumpulan data berdasarkan kenyataan dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.³⁶

Sedangkan penelitian penulis tentang Peran Humas Bkkbn Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan

³⁵ www.bkkbn.com download 14-10-2019, 18:14

³⁶ Harry Gunawan, *Strategi Humas BKKBN dalam Mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau*, Skripsi, (Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun perbedaan dalam penelitian yang penulis buat yaitu pada objek yang memfokuskan pada pegawai BKKBN. Sedangkan penelitian terdahulu hanya mencakup strategi humas BKKBN dan juga lokasi penelitiannya berbeda dari lokasi penulis teliti.

Tika Oktavianingsih (2012) Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dengan judul penelitian “*Peran Humas Lembaga Negara dalam Menjaga Reputasi Organisasi (Studi pada Peran Humas DPR RI dalam Menjaga Reputasi Kinerja DPR RI)*.” Hasil dari penelitian ini yaitu reputasi kinerja anggota dewan, Humas DPR RI telah melakukan berbagai strategi komunikasi untuk mempublikasikan kinerja anggota dewan dan menjaga hubungan baik dengan media. Humas mengalami hambatan-hambatan tertentu, yaitu kurangnya hubungan baik dengan *media relations* yang masih rendah.³⁷

Sedangkan penelitian penulis tentang Peran Humas Bkkbn Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun perbedaan dalam penelitian yang penulis buat yaitu pada objek yang memfokuskan pada pegawai BKKBN. Sedangkan penelitian terdahulu hanya mencakup Peran Humas Lembaga Negara dalam Menjaga Reputasi Organisasi dan juga lokasi penelitiannya berbeda dari lokasi penulis teliti.

Aris Mazidah (2010) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Public Relations dalam Implementasi Community Development PT. Telkom, Tbk Kandatel Yogyakarta*.” Penelitian ini memfokuskan pada kegiatan pemberitaan dalam meningkatkan Peran humas PT. Telkom, Tbk Kandatel Yogyakarta.³⁸ Hasil penelitian ini adalah

³⁷ Tika Oktavianingsih, *Peran Humas Lembaga Negara dalam Menjaga Reputasi Organisasi (Studi pada Peran Humas DPR RI dalam menjaga Reputasi Kinerja Anggota DPR RI)*, Skripsi, (Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012),

³⁸ Aris Mazidah, “*Peran Public Relations dalam Implementasi Commuity Development PT. Telkom, Tbk Kandatel Yogyakarta*”, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) dari <http://digilib.uinsuka.ac.id/5286/1/BAB%20I,%20IV.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan program community development, peran public relations PT. Telkom Kandatel Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk menghandle acara, membuat random acara dan mengkomunikasikan setiap kegiatan yang diadakan oleh Community Development Center (CDC) kepada public serta menggunakan media relations sebagai sarana untuk menjangkau publik. Peran public relations dalam implementasi Community Development melakukan bauran public relations berupa: publications (publikasi dan publisitas), event (penyusunan program acara), news (menciptakan berita), community involvemen (kepedulian pada komunitas), inform or image (memberitahukan atau meraih citra), lobbying and negotiation (pendekatan dan bernegosiasi), social responsibility (tanggung jawab sosial). Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yg penulis lakukan adalah penelitian diatas mengatakan memfokuskan pada kegiatan pemberitaan dalam meningkatkan peran humas PT. Telkom Kandatel Yogyakarta sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan pegawai humas BKKBN provinsi riau dalam mensosialisasikan program KKBPK.

d. Skripsi lainnya dengan judul Pengaruh “Peran Hubungan Masyarakat (Humas) di Pemerintah Kabupaten Bantul”, oleh Yuli Cahyaningrum (2013) Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.³⁹ Penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat peran yang ada yaitu Teknik Komunikasi, Expert Prescriber, Fasilitator Komunikasi dan Fasilitator Pemecah Masalah, peran yang dilakukan oleh humas lebih cenderung menyampaikan informasi kepada masyarakat atau sebagai teknisi komunikasi dan mengelola fasilitas komunikasi yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, walaupun belum sempurna tetapi humas pada tiga instansi tersebut sudah berusaha melaksanakan yang penulis lakukan adalah menjelaskan kegiatan sosialisasi yang dilakukan humas. Adapun perbedaan dalam penelitian yang penulis buat yaitu pada objek yang memfokuskan pada pegawai BKKBN. Sedangkan penelitian

³⁹ YuliCahyaningrum, *PeranHumas(HubunganMasyarakat)di Pemerintah Kabupaten Bantul*, Skripsi, (Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2013), dari <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t25611.pdf>,

terdahulu hanya mencakup Peran Humas dan juga lokasi penelitiannya berbeda dari lokasi penulis teliti.

Penelitian oleh Evawani Zainal Aqlidengan judul Peran Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mensosialisasikan Banjir Di Kota Samarinda. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Skripsi ini menggambarkan Peran Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mensosialisasikan Bahaya Banjir Di Kota Samarinda, Bencana banjir terjadi karena degradasi lingkungan (penurunan tingkat kualitas lingkungan) yang disebabkan oleh deforestasi dan peningkatan polusi air, udara dan tanah sehingga mengurangi daya serap tanah terhadap air. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, menutup selokan yang seharusnya menjadi tempat aliran air ketika hujan, dan sebagainya. Banyaknya sampah yang masih berserakan di sungai maupun selokan seperti plastik, botol bekas, pembalut wanita, dan sebagainya yang sulit hancur sehingga menyumbat aliran sungai atau selokan. Mereka tahu atau tidak tentang bahaya banjir sehingga hal yang mengakibatkan terjadinya banjir selalu mereka abaikan oleh karena itu pemerintah harus turun tangan untuk mensosialisasikan bahaya banjir kepada masyarakat.⁴⁰

Adapun perbedaan dalam penelitian yang penulis buat yaitu pada objek yang memfokuskan pada pegawai BKKBN. Sedangkan penelitian terdahulu hanya mencakup Peran Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan juga lokasi penelitiannya berbeda dari lokasi penulis teliti.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Evawani Zainal Aqli, Jurnal Ilmiah, *Peran Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mensosialisasikan Banjir Di Kota Samarinda*, (Samarinda: Universitas Mulawarman).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan tentang variabel yang akan dijadikan tolak ukur penelitian lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Berdasarkan hal yang diangkat oleh penulis yaitu Peran Humas BKKBN Provinsi Riau dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Maka bisa digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1:
Kerangka Penelitian

D. Konsep Operasional

Penjelasan Peranan Humas menurut Dozier & Broom dalam Ruslan (2006, 20-21) sebagai berikut:

1. **Penasihat Ahli (Expert Prescriber)** Seorang praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya.
2. **Fasilitator Komunikasi (Communication Facilitator)** Dalam hal ini, praktisi humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Disisi lain, dia juga dituntut untuk mampu menjelaskan

kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta rasa saling percaya, pengertian, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari kedua pihak.

Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*) Peranan praktisi humas dalam proses pemecahan masalah persoalan humas merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pemimpin organisasi baik sebagai penasihat hingga mengambil tindakan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi. Biasanya dalam menghadapi krisis yang terjadi, maka dibentuk suatu tim posko yang dikoordinir praktisi ahli humas dengan melibatkan berbagai departemen dan keahlian dalam satu tim khusus untuk membantu organisasi, perusahaan dan produk yang tengah menghadapi atau mengatasi persoalan krisis tertentu.

Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*) Berbeda dengan tiga peran praktisi humas profesional sebelumnya yang terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Peran teknisi komunikasi ini menjadikan praktisi humas sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan *methode of communication in organization*. Sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-masing bagian atau tingkatan, yaitu secara teknis komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari bawahan ke tingkat atasan.⁴¹

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Ruslan, Rosady. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 20-21

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian deskriptif mengamati peran humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi alat dalam proses pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri.⁴²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam usaha untuk mendapatkan data dan keterangan yang mengangkut pembahasan penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau yang beralamat Jl. Terubuk No. 1 Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan untuk observasi, wawancara, dan dokumentasi .

C. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Saifuddin Azwar dalam bukunya yang berjudul *metode penelitian*. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai data primer adalah pegawai BKKBN Provinsi Riau.

⁴² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya, data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan sumber data sekunder.⁴³

D. Informan Penelitian

Informan adalah teknik dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebuah proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil. Kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari sampel sampel yang telah ditetapkan.⁴⁴ Informan penelitian terbagi menjadi 2 yaitu

a. Informan Kunci

Informan kunci merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan toko agama dan tokoh masyarakat.⁴⁵

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Humas Perwakilan BKKBN Provinsi Riau yaitu Ibu Mery Ellya, SH dikarenakan Humas Perwakilan BKKBN Provinsi Riau ini lebih mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan oleh penulis:

b. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu Bapak Irwanto, S.Kom Sebagai Kasubbid Advokasi dan KIE dan Ibu Hidayati, SE Sebagai Kasubbid Tata Operasional serta pegawai yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah ini.

⁴³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2004),91

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta,2009,135

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (jakarta: Reineka,1980), 188

E Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi.⁴⁶ Proses pengumpulan data di lokasi penelitian meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.⁴⁷ Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap peran humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga berbasis keluarga.

b. Wawancara

Wawancara sebagai alat pengumpul data digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan kegiatan, harapan dan keinginan, dari individu atau responden. Caranya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan kepada responden oleh peneliti. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Maksudnya dilakukan wawancara tersebut antara lain untuk membuat suatu konstruksi sekarang dan disini mengenai orang, peristiwa, aktivitas, motivasi, perasaan, dan lain-lainnya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin atau tertutup. Menurut Riduwan (2004) bahwa “Dalam wawancara ini, pertanyaan diajukan

⁴⁶ Ibid; 224-225.

⁴⁷ Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1991

menurut daftar pertanyaan yang sudah disusun”. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.⁴⁸

c. Dokumentasi,

Dari asal katanya dokumen, yang artinya barang barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁴⁹ Dengan tehnik ini peneliti berusaha memperoleh data atau informasi dengan cara menggali dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip dan catatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Humas BKKBN Provinsi Riau.

F. Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, penulis harus bisa memperkecil faktor subjektivitas. Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data juga disebut keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Karena itu dalam validitas data mengenai keakuratan datanya harus berdasarkan triangulasi.

Dimana dalam penggunaan teknik ini adanya teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan suatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁵⁰ Triangulasi bukan mencari kebenaran melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai data dan fakta yang dimilikinya⁵¹ Triangulasi data dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber. Penggalan kebenaran dari informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Dengan demikian, triangulasi sumber berarti membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Penelitian selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa

⁴⁸ Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Thesis.*(Alfabeta. Bandung..2004)

⁴⁹ Sugiyono, Op.Cit; 335.

⁵⁰ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosada, 2004), 330

⁵¹ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 143

menggunakan pengamatan berperan serta, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Triangulasi sumber merupakan triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Semua data tersebut dapat digunakan untuk menambah wawasan peneliti.

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J Maleong berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat.⁵²

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka serta dijelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.

⁵² Lexy J Maleong, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000) 11.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERWAKILAN

BKKBN PROVINSI RIAU

Sejarah Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF). PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan.

Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air. Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan keluarga berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi di Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1967.

Di dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta dikeluarkan pernyataan sebagai berikut: PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai keluarga berencana yang akan dijadikan program pemerintah PKBI mengharap agar Keluarga Berencana sebagai Program Pemerintah segera dilaksanakan. PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program KB sampai di pelosok-pelosok supaya faedahnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya menentukan atau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia.

Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DPRGR, Presiden Soeharto pada pidatonya “Oleh karena itu kita harus menaruh perhatian secara serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila”. Sebagai tindak lanjut dari Pidato Presiden tersebut, Menkesra membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB dijadikan Program Nasional.

Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang isinya antara lain: Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana. Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembaga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah.

Perluasan dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional secara terarah dan terkoordinasi di Provinsi Riau dimulai pada awal Pelita III, yaitu pada era Keppres No. 38 tahun 1978. Pada saat itu telah terbentuk lembaga BKKBN Propinsi Riau sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan, penilaian, pengawasan, serta koordinasi pelaksanaan program KB Provinsi Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awal pelaksanaan program KB di Provinsi Riau, perluasan dan pengembangan pelaksanaan kegiatan KB secara terprogram dan terkoordinasi baru dilaksanakan pada tiga daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Kepulauan Riau, Bengkalis dan Indragiri Hilir. Pada ketiga daerah tersebut telah dibentuk lembaga BKKBN kabupaten untuk mengkoordinasikan perencanaan, penilaian, dan pengawasan pelaksanaan program KB di wilayah tersebut dengan dukungan sepenuhnya pemerintah daerah setempat. Sedangkan pada daerah Tingkat II lainnya, pelaksanaan kegiatan KB dilapangan langsung dibawah koordinasi BKKBN Provinsi dengan Pengawasan Petugas Lapangan KB (PPLKB) sebagai ujung tombak pelaksanaan koordinasi ditingkat Kecamatan yang bertanggung jawab langsung kepada BKKBN Provinsi. Kebijakan keluarga berencana mencakup yaitu:

1. Usia ideal perkawinan,
2. Usia ideal untuk melahirkan,
3. Jumlah ideal anak,
4. Jarak ideal kelahiran anak,
5. Penyuluhan kesehatan reproduksi.

Setelah berjalan lebih kurang dua tahun, pelaksanaan kegiatan KB di Provinsi Riau, khususnya di tiga Kabupaten tersebut diatas telah makin berkembang dan meluas serta telah berhasil mengajak sebagian masyarakat untuk ber-KB. Dengan melihat perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan KB selama dua tahun berjalan tersebut, pada era Keppres No. 64 tahun 1983 pelaksanaan program KB secara terarah dan terkoordinasi mulai diperluas keseluruh daerah Tingkat II yang ada di Provinsi Riau yang ditandai dengan penbentukan lembaga BKKBN Kabupaten/Kotamadya diluar tiga Kabupaten tersebut diatas Mulai saat itu, pelaksanaan program KB Nasional di Provinsi Riau semakin meluas dan berkembang. Partisipasi masyarakat semakin meningkat dari tahun-ketahun, dukungan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten semakin kuat dan besar. Demikian pula dukungan dan peran aktif unit

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pelaksanaan Program KB, baik instansi Pemerintah, maupun swasta dan organisasi masyarakat makin meningkat dan semakin nyata.⁵³

a. Tugas Pokok dan Kewenangan BKKBN Provinsi Riau

Tugas pokok BKKBN Provinsi Riau adalah melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kewenangan BKKBN Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana Nasional secara makro dibidangnya.
2. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angkakematian ibu, bayi dan anak.
4. Penetapan sistem informasi dibidangnya.
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a). Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
 - b). Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.⁵⁴

b. Fungsi BKKBN Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010

Pasal 3 BKKBN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan Nasional dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

⁵³ Sejarah BKKBN (Online) , <https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn>

⁵⁴ Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
7. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
8. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN.
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN.
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.⁵⁵

c. Grand Strategi BKKBN Provinsi Riau

Grand Strategi BKKBN Provinsi Riau adalah:

1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam Program KB.
2. Menata kembali pengelolaan Program KB.
3. Memperkuat SDM operasional Program KB.
4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB.
5. Meningkatkan pembiayaan Program KB.

d. Susunan organisasi BKKBN Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2010 pasal 4, BKKBN Provinsi Riau terdiri dari.

1. Kepala

Kepala adalah pemimpin BKKBN. Kepala BKKBN mempunyai tugas memimpin BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN.

⁵⁵ Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011

2. Sekretariat Utama

Sekretariat utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN. sekretariat utama dipimpin oleh sekretaris utama.

Sekretariat utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepadaseluruh unit organisasi dilingkungan BKKBN.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat utama menyelenggara-kanfungsi.

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BKKBN.
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkunganBKKBN.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKKBN.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama,dan dukungan masyarakat.
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKKBN.⁵⁶

e. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Deputi bidang pengendalian penduduk adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang pengendalian penduduk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKKBN. Bidang pengendalian penduduk meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan,perencanaan kebijakan, dan analisis dampak mengenai kependudukan serta kerjasama pendidikan kependudukan.

Deputi bidang pengendalian penduduk dipimpin oleh deputi. Deputi bidang pengendalian penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk.

⁵⁶ Dokumen BKKBN ProvinsiRiau, 2011

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian penduduk.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk.

f. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BKKBN.

Deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dipimpin oleh deputi. Deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencanadan kesehatan reproduksi.⁵⁷

g. **Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga**

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga meliputi upaya pemberian akses informasi, konseling, pembinaan, bimbingan, dan pemberian pelayanan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan ketahanan keluarga.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.⁵⁸

h. **Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi**

⁵⁷ Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011

⁵⁸ Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKKBN.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Advokasi, Penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- b. Pelaksanaan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian

penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.⁵⁹

i. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan pengembangan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang pelatihan, penelitian, dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk,

⁵⁹ Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011

Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.⁶⁰

j. Inspektorat utama

Inspektorat utama adalah unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN. inspektorat utama dipimpin oleh inspektur utama. Inspektorat utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BKKBN

Dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat utama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN.
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BKKBN terhadap kinerjadan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKKBN.
- d. Penyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan BKKBN.
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat utama.

B. Letak Geografis Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Secara geografis letak Perwakilan BKKBN Provinsi Riau di JL. Terbuk No 1, Pekanbaru.



Gambar 4.1 Letak Geografis BKKBN Provinsi Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dan Misi Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Visi menjadi Lembaga yang Handal dan Dipercaya dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas. Misi BKKBN Provinsi Riau adalah mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.⁶¹

Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Penelitian

Pembagian tugas di Perwakilan BKKBN Prov. Riau mulai dari Bidang Sekretariat, Bidang ADPIN (Advokasi, Pergerakan dan Informasi), Bidang DALDUK (Pengendalian Penduduk), Bidang LATBANG (Pelatihan dan Pengembangan), Bidang KB – KR (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi), hingga Bidang KS – PK (Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga) sesuai dengan masing-masing Subbagian dan stafnya:

1. Sekretariat

a. Subbagian Perencanaan

Tugas Pokok: Melakukan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Perwakilan BK KBN Provinsi Riau.

Rincian Tugas: Melakukan Penyiapan bahan rencana program dan anggaran, manajemen kinerja, serta analisis dan evaluasi perencanaan.

Aktivitas

- Mengumpulkan data basis perencanaan
- Menyiapkan data fisik dan program untuk menyusun rencana kegiatan
 - Mengoordinasikan data basis perencanaan.
- Menghimpun data untuk usulan rencana program anggaran tahunan
- Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).
- Menyiapkan bahan penyusunan rancangan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), petunjuk teknis, cuplikan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan AJK.

⁶¹ Penulis, Diolah Dari Data Lapangan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Menyusun usulan rencana kegiatan di Subbagian Perencanaan.
- g) Menyusun alokasi jadwal kegiatan di Subbagian Perencanaan.
- h) Menyiapkan bahan revisi kegiatan.⁶²

Subbagian Umum dan Humas

Tugas Pokok: Melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

Rincian Tugas :

- a) Melakukan pelayanan urusan ketatausahaan aktifitas
- b) Memilah-milah tujuan dokumen tertulis (surat, faksimil, buku, jurnal, laporan berkala dan lain-lain)
- c) Mencatatkan dokumen tersebut pada buku penerimaan surat masuk dan memberi lembar disposisi untuk disampaikan kepada pihak yang dituju.
- d) Mengoordinasikan staf di lingkungan tata usaha untuk mendistribusikan semua dokumen yang telah disampaikan kepada pihak yang dituju sesuai disposisi.
- e) Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait yang dituju untuk memastikan pendistribusian berjalan baik.
- f) Menyimpan dalam file semua salinan dokumen dari internal BKKBN Provinsi/pusat dan instansi lain sesuai klasifikasi berdasarkan sistem kearsipan pola baru untuk kepentingan dokumentasi.⁶³

c. Subbagian Keuangan dan BMN

Tugas Pokok: Melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan sarana program. Rincian Aktifitas Tugas :

- a) Menyiapkan data basis/bahan untuk penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, Barang Milik Negara, dan sarana program.
- b) Mengusulkan sumber daya manusia sebagai pengelola anggaran pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, Barang Milik Negara, dan sarana program.

⁶² Penulis, Diolah Dari Data Lapangan

⁶³ Penulis, Diolah Dari Data Lapangan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Mensosialisasikan aturan tentang tata cara pengelolaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, akuntansi Barang Milik Negara, dan sarana program.
- d) Mengevaluasi realisasi anggaran, pengelolaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, Barang Milik Negara, dan sarana program dan memberi umpan balik kepada user.
- e) Melakukan pembinaan kepada seluruh pengelolaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, Barang Milik Negara, dan sarana program dan pelaksanaan anggaran tentang administrasi pembukuan baik ditingkat provinsi maupun ke seluruh kabupaten/kota.⁶⁴

d. Subbagian Kepegawaian dan Hukum

Tugas Pokok: Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan tatalaksana. Rincian Tugas Aktifitas:

- a) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembahasan masalah hukum, pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana
- b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi.
- c) Mengolah, memperbarui data dalam rangka menunjang pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional.
- d) Melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan administarsi jabatan fungsional.
- e) Mengusulkan kenaikan pangkat, KGB, pensiun, PAK pegawai yang sudah waktunya memperoleh penghargaan tersebut.
- f) Membuat dan melengkapi data pegawai yang akan naik pangkat, KGB, pensiun, dan PAK.
- g) Melakukan pembinaan Tim PAK Kabupaten dan Kota.
- h) Melakukan penilaian Tim PAK bagi PKB Golongan IV.

⁶⁴ Penulis, Diolah Dari Data Lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Membuat PAK dari hasil penilaian angka kredit PKB Golongan IV.
- j) Melakukan pemantauan dan telaahan masalah-masalah dalam pelaksanaan penelaahan hukum. Perundang-undangan dan ketatalaksanaan.
- k) Melaksanakan kehumasan di tingkat Provinsi.⁶⁵

Subbagian Administrasi Pengawasan

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan Rincian Tugas:

1. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Administrasi Pengawasan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan operasional di bidang pengelolaan tata usaha pengawasan.
3. Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan program, kegiatan dan anggaran di subbagian administrasi pengawasan.
4. Mengumpulkan bahan-bahan untuk pengawasan/pemeriksaan Tim pemeriksa BKKBN Pusat meliputi pengawasan program, ketenagaan dan keuangan perbekalan.
5. Menghimpun informasi dan masukan-masukan lainnya dari berbagai pihak.
6. Menyampaikan seluruh bahan yang terkumpul kepada pimpinan.⁶⁶

2. Bidang ADPIN (Advokasi, Penggerakan dan Informasi)

Tugas Pokok: Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penggerakan, dan informasi.

a. Subbidang Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi.

⁶⁵ Penulis, Diolah Dari Data Lapangan

⁶⁶ Penulis, Diolah Dari Data Lapangan

b. Subbidang HUBALILA (Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan)

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan, serta penyiapan fasilitasi pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.

Subbidang DATIN (Data dan Informasi)

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi.

3. Bidang DALDUK (Pengendalian Penduduk)

Tugas Pokok: Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk.

a. Subbidang Penyusunan Parameter Pengendalian Penduduk

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk.

b. Subbidang Kerja Sama Pendidikan Kependudukan

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pendidikan kependudukan.

c. Subbidang Analisis Dampak Kependudukan

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan.⁶⁷

⁶⁷ Penulis, Diolah Dari Data Lapangan

4. **Bidang LATBANG (Pelatihan dan Pengembangan)**
 Tugas Pokok: Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.
- a. **Subbidang Tata Operasional**
 Tugas Pokok: Melakukan pelayanan operasional penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.
- b. **Subbidang Program dan Kerja Sama**
 Tugas Pokok: Melakukan penyusunan program dan kerja sama pendidikan, pelatihan, dan penelitian serta pengembangan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- c. **Subbidang Penyelenggaraan dan Evaluasi**
 Tugas Pokok: Melakukan penyiapan penyelenggaraan dan evaluasi serta penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
5. **Bidang KB – KR (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi)**
 Tugas Pokok: Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- a. **Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta**
 Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta.
- b. **Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus**
 Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Subbidang Kesehatan Reproduksi (KESPRO)

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi.⁶⁸

6. Bidang KS – PK (Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga)

Tugas Pokok: Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

a. Subbidang Bina Keluarga Balita, Anak, dan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lanjut usia.

b. Subbidang Bina Ketahanan Remaja

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja.

c. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

E. Struktur Organisasi Unit Kerja BKKBN Provinsi Riau

Kepala	: Drs. Agus P Proklamasi, MM
Sekretaris	:
Sub Bagian Perencanaan	: Rabiah Mayang Sari, S.Psi
Sub Bagian Umum & Humas	: Mery Ellya, SH
Sub Bagian Keuangan & BMN	: Arselan Syarif, SE

⁶⁸ Penulis, Diolah Dari Data Lapangan

<p>2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>Sub Bagian Kepegawaian & Hukum : Ratih Nur Rahmadani, S.Farm. Apt</p>	
	<p>Sub Bagian Adm Pengawasan : Ermawati, S.Sos</p>	
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>a. Kabid DALDUK : Supriyadi, S.pd, M.Sc</p>	
	<p>a) Sub Bid Penetapan Parameter Kependudukan :</p>	
<p>2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>b) Sub Bid Kerjasama Pendidikan Kependudukan : dr. Yusmala Dewi</p>	
	<p>b. Kabid KB/KR : Dra. Sri Wahyuni, M.Si</p>	
<p>3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>a) Sub Bid.Bina KB Pemerintah&Swasta : Toyib Baldi Purba, SH</p>	
	<p>b) Sub Bid.Bina KB Wilayah & Sasaran Khusus : Rudi Salman, S.Sos</p>	
<p>4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>c) Sub Bid.Kesehatan Reproduksi : Hj.Meldawati Rusli, SE</p>	
	<p>c. Kabid KS/PK : Yasni, S.IP</p>	
<p>5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>a) Sub Bid.Bina balita, anak&lansia : Tresnawati, S.Sos</p>	
	<p>b) Sub Bid.Ketahanan Remaja : Ermayani, SE</p>	
<p>6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>c) Sub Bid.Pemberdayaan Ekonomi Keluarga : Dasril, SE</p>	
	<p>d. Kabid ADPIN : H. Said Masri, SH, M.Si</p>	
<p>7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>a) Sub.Bid Data & Informasi : Nurhamzals, SH</p>	
	<p>b) Sub.Bid Advokasi dan KIE : Irwanto. SKom</p>	
<p>8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>e. Kabid LATBANG : Drs. Jumadi R</p>	
	<p>a) Sub Bidang Tata Operasional : Hidayati, SE</p>	
<p>9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>b) Sub Bid.Prog & Kerjasama : Hazni Chairina, SE</p>	
	<p>c) Sub Bid.Penyelenggaraan & Evaluasi : Sri Endang Purwani, BA</p>	
<p>10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>f. Widyaiswara Madya : Drs.Armel Ozsa, M.Sc</p>	
	<p>g. Widyaiswara Pertama : Bubung Bunyamin, S.pd.i</p>	
<p>11. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>h. Widyaiswara Pertama : Remon Hendra, S.Sos</p>	
	<p>i. Pustakawan : Supratman</p>	
<p>12. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>j. Arsiparis : Elmaweni</p>	
	<p>k. Auditor : M. Mulia Darma, SE</p>	
<p>13. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>l. Auditor :</p>	
	<p>Pusyanra</p>	
<p>14. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>a. Ketua : HelmiYardi, S.Pd</p>	
	<p>b. Administrasi : Intan Fandin, SKM</p>	
<p>15. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>c. Konselor KB-KR</p>	
	<p>a) Koordinator : dr. Alti Idah Anugrah</p>	
<p>16. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>b) Anggota : Hj. Suwerti, Amd.Keb</p>	



d. **Konselor Ketahanan Remaja**

- a) Koordinator : Drs. H. Mukhlisin, MR, M.Si
- b) Seksi Pembina BKB : Malaysiana, S.Ip
- c) Seksi Pembina BKR : Donni Irawan BA
- d) Seksi Pembina BKR : Herda, S.Pd
- e) Seksi Pembina BKR : Suci Mulya Prima, Ssi, M.Si
- f) Seksi Pembina BKR : Sri Rejeki

e. **Konselor Psikologi**

- a) Koordinator : Dra. Indriani, M.Pd. Kons
- b) Anggota : Siska Mardes, M.Pd, Kons
- c) Anggota : DinaFebriani, S.Psi.⁶⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan temuan penulis pada Bab sebelumnya mengenai peran humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga, maka penulis menyimpulkan bahwa dari empat bagian teoritis peran di atas Humas BKKBN Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program KKBPK hanya menggunakan Peran sebagai Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*). Peran teknisi komunikasi ini menjadikan praktisi humas sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan *methode of communication in organization*.

Dalam perannya sebagai teknisi komunikasi, humas BKKBN Provinsi Riau tidak hanya melakukan komunikasi dua arah dengan publiknya, tetapi juga ikut terjun langsung ke lapangan sebagai wartawan untuk kegiatan-kegiatan internal yang diadakan instansi.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap peran praktisi humas dalam meningkatkan kesuksesan mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga BKKBN Provinsi Riau, sebagai masukan serta menambah referensi program kerja dalam meningkatkan kesuksesan mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana, maka ada beberapa saran yang mungkin berguna, antara lain:

1. Sehubungan dengan usaha membina hubungan publik, praktisi humas juga sebaiknya lebih membangun dan membina hubungan dengan media, seperti melakukan *media visit*, atau konferensi pers dengan media sehubungan dengan adanya kegiatan, program, ataupun layanan-layanan baru yang dimiliki BKKBN Provinsi Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menambah sumber daya manusia di bidang humas. Kurangnya SDM yang menjadi staf humas kadang menjadikan program atau kegiatan yang dilakukan menjadi kurang efektif.

Hendaknya humas BKKBN Provinsi Riau menjaga pencapaian-pencapaian prestasi yang telah diraih yaitu image yang cukup baik dikalangan masyarakat.

Memperbaiki sistem peraturan yang telah di buat, tegas kepada anggota agar dapat lebih menerapkan etika yang sudah berjalan dengan baik di pemerintahan agar kesuksesan mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana lebih baik lagi di kalangan masyarakat.

Meningkatkan lagi dalam pelayanan dan peran humas BKKBN Provinsi Riau agar menjadi lebih baik.

Sedangkan masukan untuk saya sendiri sebagai peneliti ialah dengan adanya penelitian skripsi ini dapat menambah pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Siswanto, MA., 1992, *Humas Hubungan Masyarakat Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si., 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Ham. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si, 2012, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana,
- Imam Gunawan. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
- Lexy J Moleong, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosada.
- Morisan, M.A. 2010, *Manajemen Public Relations*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyana, Deddy, Anwar Arifin, Hafied Cangara. 2011. *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Narwoko & Bagong, 2007, *Sosiologi Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana,
- Onong Uchjana Effendy, 2002, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*, Cetakan ke-6 PT Remaja Rosdakarya,
- Riduwan. 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Thesis*. Bandung: Alfabeta.
- Rosady Ruslan, 2008, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- _____, 2010. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, Jakarta: Grafindo.
- _____, 2014, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers,
- _____, 2011, *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi*, Ed. Revisi, cet ke-6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Saifuddin Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: pustaka pelajar
- Slame Makmur, "Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi*.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono, 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Dra Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

Soeh Soemirt & Elvinaro Ardianto, 2003, *Dasar-Dasar Public Relations*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

Sharsimi Arikunto, 1980, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reineka.

Zainal Mukarom, M.Si & Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.Si., 2015, *Manajemen Public Relations*, Bandung: Pustaka Setia,

WEBSITE

<https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn>

<http://riau.bkkbn.go.id/read/2174726/harapan-baru-bangkitnya-program-pembangunan-keluarga>

<http://riau.bkkbn.go.id/Tantangan-Program-KKB-Makin-Berat> 3184,

<http://humas-publicrelations.blogspot.com/2013/10/humas-hubungan-masyarakat.html?m=1>

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional

JURNAL

Aris Mazidah, “Peran Public Relations dalam Implementasi Community Development PT. Telkom, Tbk Kandatel Yogyakarta”, Skripsi,(Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2010)

Al-Fauzi, Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan, Vol. 3 No.1, Maret 2017,

Andre Kawulur, “Peranan Bkkbn Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan)”, *Jurnal Administrasi Publik*, 2015,

Tika Otavianingsih, *Peran Humas Lembaga Negara dalam Menjaga Reputasi Organisasi (Studi pada Peran Humas DPR RI dalam menjaga Reputasi Kinerja Anggota DPR RI)*,

Yuli Cahyaningrum, *Peran Humas (Hubungan Masyarakat) di Pemerintah Kabupaten Bantul*, Skripsi, (Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2013),

DOKUMENTASI

Hasil wawancara dengan Kabid Umum dan Humas, Merry Elya SH Pada tanggal 21 Agustus 2019 di Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Pekanbaru

Hasil wawancara dengan Kasubbid Advokasi dan KIE, Irwanto, S.Kom, Pada tanggal 22 Agustus 2019 di Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Pekanbaru

Hasil wawancara dengan Kasubbid Tata Operasional Hidayati SE Pada tanggal 21 Agustus 2019 di Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

“PERAN HUMAS BKKBN PROVINSI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)”

1. Penasihat Ahli (*Expert Prescriber*)

- a. Bagaimana peran humas BKKBN sebagai penasihat ahli dalam mensosialisasikan program KKBPK?
- b. Sebagai penasehat ahli bagaimana strategi humas dalam memberikan pemahaman terkait program KKBPK kepada masyarakat?
- c. Bagaimana humas BKKBN Provinsi Riau membantu memberikan masukan dan pemikiran kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisaikan program KKBPK?
- d. Apa saja yang dilakukan humas dalam program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga?
- e. Bagaimana komunikasi yang dilakukan humas BKKBN Provinsi Riau dalam program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga?
- f. Bagaimana bentuk penugasan pegawai dalam mensosialisasikan program KKBPK?

2. Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*)

- a. Bagaimana humas menyelaraskan kepentingan instansi dengan kepentingan kebutuhan publik?
- b. Bagaimana peran humas BKKBN sebagai fasilitator komunikasi dalam mensosialisasikan program KKBPK?
- c. Saluran komunikasi apa yang dipilih untuk menyebarluaskan atau menyampaikan pesan kepada khalayak sasaran program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga?
- d. Bagaimana strategi humas dalam membangun relasi yang baik kepada media massa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Riau

- Riau

DOKUMENTASI

Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Riau



Ruang Sekretariat, Umum dan Humas tampak depan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/1004/2018 Pekanbaru, 04 Jumadil Akhir 1439 H
Sifat : Biasa 20 Februari 2018 M
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. Syapi'i

Kepada Yth.

1. Intan Kemala, S.Sos., M.Si

2. Muhammad Soim, MA

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. Syapi'i NIM. 11443101325 dengan judul "Peran Humas BKKBN Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Berbasis Keluarga". (proposal terlampir), maka kami harapkan kesediaan saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

3. Materi / Isi Skripsi
4. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan & perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan



Dr. Yasril Yazid, M.S

NIP. 19720429 200501 1 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/5133/2019

Pekanbaru, 06 Dzulqaidah 1440 H

Sifat : Biasa

09 Juli 2019 M

Lampiran: 1 (satu) Eksemplar

Hal : Mengadakan Penelitian

Kepada Yth.

Gubernur Riau

Up. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa mahasiswa kami :

Nama : Syapli
NIM : 11443101325
Jurusan/Prodi : Ilmu Komunikasi

Mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir
skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul :

**"Peran Humas BKKBN Provinsi Riau dalam Mensosialisasikan Program
Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK)"**

Adapun sumber data penelitian adalah :

"BKKBN Provinsi Riau"

Untuk maksud tersebut kami mohon berkenan memberikan petunjuk-
petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian
tersebut.

Demikianlah yang kami sampaikan dan atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Rektor,
Dekan,



Dr. Nurin, MA

NIP. 1960620 200604 1 015

Tembusan :

1. Rektor UIN Suska Riau
2. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
3. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-Riset/24421
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/5133/2019 Tanggal 9 Juli 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : SYAPI'I
2. NIM / KTP : 11443101325
3. Program Studi : ILMU KOMUNIKASI
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PERAN HUMAS BKKBN PROVINSI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (BKKBN)
7. Lokasi Penelitian : BKKBN PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Juli 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

SYAPI'I , lahir di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada tanggal 21 Juni 1996 merupakan anak kedua dari 6 (enam) bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda H. Hamran (Alm) dan Ibunda Nafsiah. Pada tahun 2002 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 008 Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.

Lulus pada tahun 2008. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada MTsN 094 Tembilahan Kota selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Tamat dari MTsN tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Negeri 1 Inhil 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan jurusan Ilmu Komunikasi.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua bulan) di Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Pekanbaru. Selain itu penulis juga melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Kelurahan Pangkalan Tujuh Kabupaten Indragiri Hilir. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang - orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"Peran Humas BKKBN Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)"** di bawah bimbingan langsung Ibu Intan Kemala, M.Si dan Bapak Muhammad Soim, MA. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tanggal 16 Desember 2019, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah